

Sumber : <i>Republika</i>	Hari/Tgl : <i>Selasa, 05 November 2019</i>	Hlm/Kol : <i>VI / 2.</i>
Subjek : <i>Keuangan Syariah</i>	Bidang :	

Menuju Pusat Keuangan Syariah

● MARIF

Indonesia berpotensi besar menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Berbagai kebijakan, inisiatif, dan sinergi terus dibangun untuk mewujudkan cita-cita ini.

Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 yang menetapkan Indonesia di peringkat pertama, menjadi salah satu barometer kita semakin dekat dalam mewujudkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Menjadi pusat keuangan syariah dunia bukan hanya merupakan ambisi Indonesia, melainkan juga negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Malaysia, Qatar, Uni Emirat Arab, bahkan negara liberal sekelas Inggris.

Bagaimana tidak, jumlah penduduk Muslim dunia yang saat ini 1,9 miliar diproyeksikan melejit hingga 2,7 miliar atau hampir sepertiga dari populasi dunia pada 2050.

Pertumbuhan ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan halal secara signifikan, termasuk keuangan syariah yang berpotensi mencapai 3.809 miliar dolar AS pada 2023, mengacu pada laporan State of Global Islamic Economy 2018/2019.

Dengan menjadi pusat keuangan syariah, Indonesia berpeluang menjadi destinasi utama arus investasi syariah, khususnya investor negara Islam serta investor negara Barat yang mencari investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial.

Dalam mencapai ambisi itu, rekognisi dari lembaga internasional merupakan salah satu indikator esensial. Baru-baru ini, Indonesia meraih peringkat pertama dalam GIFR 2019 yang diterbitkan Cambridge Institute of Islamic Finance (Cambridge-IIF).

Pencapaian ini adalah kontribusi dari semua penggerak keuangan syariah yang patut kita apresiasi, mengingat pada tahun sebelumnya Indonesia di posisi keenam dan sekarang menyalip Malaysia yang mendominasi posisi teratas sejak GIFR diinisiasi pada 2011. Berdasarkan laporan itu, Indonesia mendapatkan nilai 81,93 dalam skala 100 atau meningkat 57,80 poin dari tahun sebelumnya.

Lompatan ini didorong lima aspek. Pertama, adanya komitmen kuat pemerintah untuk mengembangkan keuangan syariah.

Ini tecermin dari keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Kedua, besarnya ukuran ekonomi Indonesia yang terindikasi dari jumlah PDB tertinggi di antara negara OKI dan ditunjang pertumbuhan masyarakat kelas menengah.

Ketiga, dukungan regulator dalam menciptakan *level-playing field* yang sesuai karakter industri keuangan syariah. Keempat, perluasan cakupan ekosistem keuangan syariah yang meliputi di antaranya wisata halal, zakat, dan penerbitan *waqf-linked* sukuk.

Terakhir, kiprah pelaku industri keuangan syariah Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional.

Ruang penyempurnaan

Prestasi ini hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Masih ada beberapa ruang penyempurnaan yang harus kita lakukan. Salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi masalah klasik adalah ukuran dari industri keuangan syariah kita.

Pasalnya, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dan industri keuangan syariah telah beroperasi lebih dari dua dekade, pangsa pasar industri keuangan syariah kita belum signifikan dibandingkan total industri keuangan.

Berdasarkan statistik OJK, total aset keuangan syariah posisi Agustus 2019 tercatat Rp 1.383,63 triliun (di luar saham syariah), terdiri atas perbankan syariah (Rp 496,2 triliun), pasar modal syariah (Rp 783,91 triliun), dan lembaga keuangan nonbank syariah (Rp 103,52 triliun).

Jumlah itu masih berkisar delapan persen dari total industri keuangan. Sementara itu, segmen perbankan syariah baru menguasai 5-6 persen dari total industri perbankan. Angka ini tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia yang telah mencapai lebih dari 20 persen.

Akar masalahnya, kapasitas industri keuangan syariah yang masih terbatas dan kurangnya permintaan atas produk keuangan syariah. Di sektor perbankan, misalnya, belum ada bank syariah yang masuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) 4 yang memiliki modal inti di atas Rp 30 triliun.

Sambungan

Sumber: *Republika*

Hari/Tgl: Selasa, 05 November 2019

Hlm/Kol: VI/2.

Dampaknya, bank syariah saat ini belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan berskala besar.

Untuk meningkatkan kapasitas, beberapa inisiatif dapat ditempuh. Pertama, membuka ruang lebih lebar pemanfaatan fasilitas bank konvensional untuk memperluas layanan dan pemasaran bank umum syariah, tentu masih dalam koridor prinsip syariah.

Kedua, konsolidasi beberapa bank syariah. Ini tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga efisiensi, daya saing, dan ketahanan industri keuangan syariah. Ketiga, pembentukan bank BUMN syariah.

Fakta bahwa mayoritas pangsa pasar perbankan didominasi bank pelat merah, semakin menjustifikasi perlunya kehadiran bank BUMN syariah di Indonesia.

Selain peningkatan kapasitas lembaga jasa keuangan yang harus terus kita pacu, inovasi, dan saluran distribusi produk keuangan syariah juga harus terus dikembangkan agar dapat lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat.

Menyikapi perubahan gaya hidup masyarakat di tengah pesatnya kemajuan teknologi keuangan, produk keuangan syariah tidak boleh kalah dari produk keuangan konvensional dalam kesesuaiannya memenuhi kebutuhan masyarakat dan harus mudah diakses.

Dalam hal ini, kehadiran delapan *fintech peer-to-peer lending* syariah membuka jalan baru bagi masyarakat untuk berinvestasi atau memperoleh pembiayaan secara daring.

Tak hanya itu, penciptaan permintaan atas produk dan layanan keuangan syariah harus diperbesar. Edukasi dan sosialisasi produk dan layanan keuangan syariah harus terus dilakukan. Lebih lanjut, *demand* yang tercipta hendaknya diaktualisasikan dalam keseharian kita sehingga mampu naik tingkat dari amal niat menjadi amal perbuatan.

Termasuk dalam hal ini memprioritaskan penggunaan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan anggaran pemerintah/instansi/perusahaan/diri sendiri, penempatan dana ZIS dan dana haji, serta kebutuhan layanan keuangan lainnya.

Melengkapi upaya ini, sinergi yang lebih solid antara industri halal, keuangan syariah, dan organisasi keagamaan dapat mempercepat terbangunnya permintaan atas produk dan layanan keuangan syariah.

Dengan terbangunnya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta tingginya komitmen dan sinergi antarpemangku kepentingan, niscaya cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia semakin dekat kita wujudkan. ■